

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun Telp. (0532) 23752 PANGKALAN BUN 74112

Pangkalan Bun, 22 Juni 2021

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Se- Kab. Kotawaringin Barat di -

TEMPAT

<u>SURAT EDARAN</u> Nomor : 861.5/1348/BKPP.IV/2021

TENTANG PENYUSUNAN SASARAN KINERJA DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat wajib menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 2. SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh PNS setiap tahun.
- 3. Penyusunanan SKP tahun 2021 terbagi atas 2 (dua) periode, yaitu :
 - a. Periode Januari s/d Juni 2021, teknis penyusunan SKP dan format SKP menggunakan format yang lama (sesuai Peraturan Kepala BKN nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS). Nilai SKP bulan Januari s/d Juni tersebut kemudian dikonversi ke format yang baru (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil).
 - b. Periode Juli s/d Desember 2021, teknis penyusunan SKP dan format SKP berdasarkan format yang baru sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem

- 2) SKPD melakukan penjabaran sasaran strategis target kinerja organisasi (cascading) yang dilakukan dengan dialog kinerja untuk menentukan strategi peran-hasil individu (tugas dan target masing-masing PNS). Cascading dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2021.
- 3) Hasil dari *cascading* melalui dialog kinerja sebagaimana dimaksud dituangkan dalam matrix dialog kinerja dan rencana SKP PNS.
- 4) Penyusunan rencana SKP PNS harus selaras dengan Perjanjian Kinerja Pegawai dan Uraian Jabatan.
- 5) Model SKP yang digunakan untuk tahun 2021 adalah SKP Model Dasar/Inisiasi.
- Rencana SKP PNS direview oleh pengelola kinerja sebelum ditetapkan menjadi SKP PNS.
- Dalam masa transisi/peralihan, untuk tahun 2021 pengelola kinerja adalah pejabat yang menangani kepegawaian dan pejabat yang menangani perencanaan pada masing-masing SKPD.
- 4. Nilai dan predikat kinerja PNS tahun 2021 diperoleh dengan mengintegrasikan hasil penilaian SKP periode Januari s/d Juni 2021 dan penilaian SKP periode Juli s/d Desember 2021. Integrasi hasil penilaian tersebut dilaksanakan paling lambat bulan Februari 2022.
- Adapun format SKP dan tata cara pengintegrasian SKP tahun 2021 dapat diunduh pada https://bit.ly/bahanSKP2021.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

> SUYANTO, SH., MH Pembina Utama Madya NIP 19640418 199203 1 009